

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Peran Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam mengatasi ilegal fishing sangat penting, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan. Undang-Undang 69 Tahun 2020 mencantumkan larangan bagi setiap orang untuk melakukan ilegal fishing, yang melibatkan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah perikanan Indonesia. Ilegal fishing di Kepulauan Riau terutama melibatkan kapal asing tanpa izin yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan kerugian bagi sumber daya ikan dan ekonomi nelayan setempat.

PSDKP melakukan pengawasan dan memberlakukan aturan untuk menertibkan aktivitas ilegal fishing, namun terbatasnya jumlah personel dan sarana prasarana memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama nelayan, yang memiliki pengetahuan dan akses lebih mendalam terhadap wilayah perairan. Melalui Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), PSDKP melibatkan masyarakat, khususnya nelayan, dalam pelatihan dan pemahaman mengenai dampak buruk ilegal fishing serta jenis-jenis alat tangkap yang berpotensi merusak biota laut. Pengawasan ilegal fishing oleh masyarakat telah memberikan hasil positif, seperti aktifnya laporan dari masyarakat tentang kapal-kapal mencurigakan, yang memudahkan PSDKP dalam mengambil tindakan hukum

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas ilegal fishing memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat serta pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan.

Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, PSDKP dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan dalam mengawasi dan melindungi sumber daya kelautan. Meskipun ada keterbatasan dan tantangan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat nelayan diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya kelautan dan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil diskusi yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran untuk kesimpulan yang dapat diambil:

a. Meningkatkan Kapasitas PSDKP:

Pemerintah perlu memperkuat kapasitas PSDKP dengan menyediakan lebih banyak personel dan sarana prasarana, seperti kapal pengawas, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap ilegal fishing. Dengan demikian, PSDKP dapat lebih responsif dalam menanggapi laporan dan melakukan tindakan penegakan hukum.

b. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi terhadap masyarakat, terutama nelayan, perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan. PSDKP dapat mengadakan lebih banyak pelatihan dan

sosialisasi mengenai dampak buruk ilegal fishing serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberantasnya.

c. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Lain

PSDKP perlu menjalin kolaborasi dengan pihak terkait lainnya, seperti lembaga pemerintah lain, LSM, dan sektor swasta, untuk memperluas jangkauan pengawasan dan memaksimalkan upaya memberantas ilegal fishing. Kerjasama lintas sektor dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam mencapai tujuan yang sama.

d. Penguatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas

Program POKMASWAS perlu terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya. PSDKP dapat memberikan lebih banyak pelatihan dan dukungan teknis kepada kelompok masyarakat pengawas agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal fishing dan membantu dalam pengawasan.

e. Penghargaan dan Pengakuan atas Partisipasi Masyarakat

PSDKP dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam memberantas ilegal fishing. Hal ini dapat menjadi stimulus positif bagi masyarakat untuk terus berkontribusi dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan.